

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan dari belenggu kolonialisme Barat dan Timur merepresentasikan sebuah diskursus panjang tentang resistensi terhadap dominasi asing. Kolonialisme, sebagai sebuah sistem penindasan, tidak hanya berimplikasi pada penderitaan fisik dan material, tetapi juga pada stagnasi perkembangan teknologi dan sumber daya manusia di wilayah terjajah. Kesadaran akan imperatif untuk melepaskan diri dari dominasi ini termanifestasi dalam berbagai bentuk perlawanan bersenjata sejak abad ke-16. Perlawanan-perlawanan ini, yang diinisiasi oleh elit lokal (bangsawan dan ulama), cenderung bersifat sporadis dan terfragmentasi secara geografis. Meskipun dilandasi oleh semangat patriotisme yang tinggi, perlawanan-perlawanan tersebut secara konsisten gagal mencapai tujuan pembebasan. Perang Jawa (1825-1830), di bawah kepemimpinan Pangeran Diponegoro,¹ meskipun menjadi salah satu contoh mobilisasi massa terbesar, pada akhirnya dapat dipatahkan oleh kekuatan militer Belanda. Kegagalan ini mengindikasikan adanya defisiensi dalam strategi perjuangan yang bersifat komprehensif dan terkoordinasi pada skala nasional.

¹ Dr. Peter Carey *ASAL USUL PERANG JAWA*, (Yogyakarta, : LKis Yogyakarta, 2012) hlm.2

Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 menandai transisi krusial dari status terjajah menjadi negara berdaulat. Namun, proklamasi ini bukanlah *terminus ad quem* (titik akhir) dari perjuangan, melainkan *terminus a quo* (titik awal) dari fase baru dalam mempertahankan eksistensi negara. Pembentukan negara-bangsa (*nation-state*) Indonesia memerlukan legitimasi politik dan konstitusional. Pengesahan UUD 1945 oleh PPKI dan pengangkatan Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden, yang diusulkan oleh Otto Iskandardinata,² merupakan langkah fundamental dalam membangun tatanan kenegaraan yang baru. Legitimasi ini esensial untuk mendapatkan pengakuan internal (dari rakyat) dan eksternal (dari negara lain).

Akan tetapi, realitas politik internasional pasca-Perang Dunia II tidak serta-merta mendukung kemerdekaan Indonesia. Belanda, sebagai bekas kekuatan kolonial, berupaya untuk menegaskan kembali kontrolnya atas wilayah Indonesia. Upaya *re-kolonisasi* ini memicu konflik bersenjata yang meluas, dengan pertempuran-pertempuran signifikan seperti di Ambarawa, Surabaya, Bandung, Medan, dan Bali. Di ranah diplomasi, Indonesia berupaya mencari pengakuan internasional dan berunding dengan Belanda (Perjanjian Linggarjati dan Renville). Namun, inkonsistensi dan pelanggaran perjanjian oleh Belanda.³

²Batarang R. Hutangalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949* (Yogyakarta; LKiS Yogyakarta, 2012) hlm. 129

³ Ahmad Mansyur Surya Negara, *Api Sejarah Jilid 2*, (Bandung: Surya Dinasti, 2015) hlm 171-172

Bahwa diplomasi, tanpa dukungan kekuatan militer yang sepadan, tidak memadai untuk menghadapi kekuatan kolonial yang bertekad untuk mempertahankan kepentingannya.

Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948 merupakan eskalasi konflik yang signifikan. Serangan terhadap Yogyakarta, sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia, dan penawanan para pemimpin negara, menciptakan *vacuum of power* yang berpotensi fatal bagi kelangsungan negara.⁴Situasi ini menggarisbawahi kerentanan negara yang baru merdeka dalam menghadapi agresi militer yang terorganisir.

Konteks krisis eksistensial inilah, pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Bukittinggi, berdasarkan radiogram dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta kepada Syafruddin Prawiranegara,⁵ menjadi tindakan strategis yang menentukan. PDRI tidak hanya mengisi kekosongan kepemimpinan, tetapi juga berfungsi sebagai simbol perlawanan dan *center of gravity* bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pembentukan PDRI merepresentasikan resiliensi dan adaptabilitas bangsa Indonesia dalam menghadapi situasi darurat.

Penelitian mengenai PDRI memiliki signifikansi yang tinggi, baik dari perspektif historis maupun teoretis. Secara historis, penelitian ini akan merekonstruksi peran dan fungsi PDRI

⁴ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.5

⁵ Batarang R. Hutangalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949*(Yogyakarta; LKiS Yogyakarta,2012)hlm.129

dalam mempertahankan eksistensi negara Indonesia selama periode kritis. Secara teoretis, studi tentang PDRI dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang konsep *state survival* (kelangsungan hidup negara) dalam kondisi *extraordinary* (luar biasa). Analisis terhadap PDRI dapat memperkaya khazanah ilmu politik, khususnya dalam studi tentang pemerintahan darurat, strategi pertahanan, dan diplomasi dalam kondisi konflik.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan fokus pada dimensi politik, militer, dan diplomatik. Penelitian ini juga dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti pada sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan, khususnya pada dinamika perjuangan para pendiri bangsa dan evolusi sistem ketatanegaraan Indonesia dalam menghadapi tantangan internal dan eksternal.

B. BATASAN MASALAH

Penelitian ini dibatasi pada kajian mengenai Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) yang berlangsung pada tahun 1948 hingga 1949, agar fokus kajian tetap terarah dan tidak melebar ke luar periode tersebut.

C. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi Indonesia pasca kemerdekaan 1945 ?
2. Bagaimana latar belakang pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ?

3. Bagaimana Peran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam mempertahankan Eksistensi kemerdekaan Republik Indonesia ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dari dibentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia sesuai dengan rumusan masalah diatas sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi Indonesia pasca kemerdekaan 1945.
2. Bagaimana latar belakang pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ?
3. Bagaimana Peran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam mempertahankan eksistensi kemerdekaan.

E. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai tiga manfaat antara lain.

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini di harapkan dapat memberikan, menambah wawasan dan memberikan motivasi yang lebih terhadap kalangan akademis Sejarah Kebudayaan Islam dalam mengkaji dan mempelajari peristiwa sejarah nasional, karena hari ini adalah bentukan dari masa lalu, yang mana dalam mengetahui peristiwa masa lalu di perlukan kalangan akademis Sejarahwan dalam mengkaji dan mebukukannya agar dapat di pelajari dan di nikmati masyarakat umum.
2. Manfaat Praktis bagi penulis, penelitian ini di harapkan dapat menjadi sarana bagi penulis dalam mengembangkan dan mengimplementasikan kepeminatan penulis dalam

mempelajari sejarah nasional indonesia yang berhubungan dengan konstitusi dari sebuah Negara maupun dari bentuk dan segi sebuah pemerintahan untuk dapat disebar luaskan kepada khalayak umum.

3. Manfaat Praktis bagi Insitusi, diharapkan agar dapat memberikan sumbangan keilmuan berupa karya tulis sejarah bagi UINSSC Syekh Nurjati Cirebon dan Fakultas Usuluddin Adab, dan khususnya bagi Jurusan Sejarah Pradaban Islam yang terkait dengan Sejarah Nasional yang masih perlu disebar luaskan kepada khalayak umum agar menjadi refleksi bagi Mahasiswa dan masyarakat tentang intitas sebuah Negara.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Penulis menelusuri berbagai literatur yang berkaitan langsung dengan judul penelitian yang diambil yakni, Pemerintahan Darurat Republik Indonesia peran dan fungsi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Adapun beberapa tinjauan pustaka yang penulis telusuri antara lain sebagai berikut. Skripsi karya Rio Yenvana Permana yang berjudul *"Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Suatu Strategi dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1948 - 1949"*. Jember: Universitas Negeri Jember 2013. Skripsi ini memfokuskan penelitian terhadap kajian strategi yang dilakukan Pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam menggapai agresi militer Belanda II, yang mengkhususkan mengkaji dan membahas terkait strategi deplomasi yang di lakukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan eksistensi Negara Republik Indonesia. Skripsi tersebut

menyampaikan bahwa Pemerintahan darurat Republik Indonesia dapat menjalankan strategi diplomasi dan Meliter karna di bantu oleh pasukan tentara nasional republik Indonesia yang di pimpin langsung oleh Jenderal besar Sudirman, Jenderal Sudirman menyatakan tunduk dan patuh terhadap perintah dari Ketua Pemerintahan darurat Indonesia di Sumatra Barat yakni Safruddin Perwira Negara, hal tersebut membuat kedaulatan dari Pemerintahan darurat indonesia di akui di skala Nasional maupu Internasional, dari adanya pengakuan tersebut Pemerintahan darurat indonesia dapat menjalankan strategi diplomasi dan memerintahkan pasukan TNI agar melakukan perlawanan terhadap Belanda dengan bergriya agar menjaga eksistensi Negara Republik Indonesia di kanca Internasional bahwa Pemerintahan Republik Indonesia masih ada.Walaupun para Presiden dan kabinetnya diasingkan ke pulau Bangka.⁶

Persamaan skripsi dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang Pemerintahan darurat Republik Indonesia, adapun perbedaannya antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah pada fokus kajian yang dibahas, penelitian tersebut lebih ke berfokus tentang strategi diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintahan Darurat Indonesia, sedangkan penelitian ini berfokus pada peran dan fungsi Pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan pada sisi upaya upaya yang dilakukan secara komprehensif.

⁶Skripsikarya Rio Yenvana Permana yang berjudul:”*Pemerintahan Darurat Republik Indonesia Suatu Strategi dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 1948 -1949*”(Jember:Universitas Negeri Jember 2013)hlm.05

Jurnal karya Erasiah yang berjudul: Studi Pemikiran Mestika Zed Tentang Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, Jurnal Mimbar Sejarah, Budaya dan Agama, Vol 5 no (1): 91-111. Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Artikel ini berfokus pada pemikiran Mestika Zed tentang Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, dalam penelitian ini berfokus pada sebuah buku Mestika Zed yang berjudul *Some Where in the jungle Pemerintahan Darurat Republik Indonesia*. Artikel ini menjelaskan dalam pandangan Mestika Zed Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) adalah salah satu episode sejarah Nasional Indonesia. Bahwa dalam upaya menyelamatkan negara RI dari tindakan brutal Belanda pada saat Agresi militer Belanda II yang sangat mengancam eksistensi Negara Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis sama-sama membahas tentang Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis, penelitian ini berfokus pada pandangan Mestika Zed tentang PDRI sedangkan penelitian penulis hanya berfokus pada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia⁷.

Skripsi karya Sekar Pratama yang berjudul :”*Peranan Sjafruddin Perwira Negara Dalam pemerintahan Indonesia 1945-1949*” Jember Universitas Jember 2019. Skripsi ini membahas tentang peranan Sjafruddin perwira Negara dalam Pemerintahan Republik Indonesia 1945-1949, penelitian ini berfokus pada sosok

⁷Erasiah, *Studi Pemikiran Mestika Zed Tentang Pemerintahan Darurat Republik Indonesia*, Vol 5 no.1 (2019)

Sjafruddin Perwira Negara dalam mengabdikan diri bagi bangsa Indonesia, peran penting Sjafruddin bagi bangsa Indonesia Tahun 1945-1949 yaitu diawali dengan terpilihnya Sjafruddin menjadi salah satu Badan Pekerja KNIP pada tanggal 16 dan 17 oktober 1945, menjadi Menteri keuangan Kabinet Sjahrir III dengan salah satu kebijakan yang mengeluarkan Oeang Republik Indonesia (ORI), dan pemberian mandat oleh Wakil Presiden Muhamad Hatta saat kondisi penawanan Presiden dan kabinetnya oleh Belanda pada agresi militer Belanda II, peran penting Sjafruddin dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjalankan roda Pemerintahan Republik Indonesia sangat penting bagaimana tidak peran Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam mempertahankan merdekaan ditengah gempuran militer belanda secara terus menerus, peran penting dari ketua PDRI Sjafruddin Perwira Negara dalam menjalankan roda Pemerintahan dalam situasi darurat sangat berhati-hati dan penuh dengan perhitungan, ada salah satu momen ketika Mohamad Roem memintapersetujuan untuk melakukan perundingan dengan belanda, Sjafruddin Perwira Negara enggan untuk menyetujuinya, sampai berita tentang hal tersebut sampai kepada M.Hatta dan Sukarno yang sedang diasingkan di pulau Bangka, dan mereka menyurati Sjafruddin agar memberikan persetujuan agar perundingan Roem Royen bisa dilaksanakan.

Persamaan Skripsi ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini juga membahas terkait kebijakan yang dilakukan oleh Sjafruddin Perwira Negara dalam menjalankan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, juga menjelaskan secara kronologis

tentang penyerahan mandat Pemerintahan Darurat ke Pemerintahan yang sah, adapun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis ialah penelitian ini berfokus pada Peranan Sjafruddin Perwira Negara dalam pemerintahan Indonesia 1945-1949, sedangkan penelitian penulis berfokus pada Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.⁸

G. LANDASAN TEORI

Dalam sebuah penelitian tentu di perlukan sebuah konsep yang di gunakan untuk membantumenyusun logika penelitian dan menyambungkan penelitian, pengetahuan yang sudah didapat oleh penulis digunakan sebagai pandangan untuk menjelaskan fenomena sejarah yang didapat pada penelitian, kerangka konseptual juga berfungsi untuk arah fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis.⁹

Mengenai penelitian yang penulis lakukan tentang Peran Pemerintahan Darurat Indonesia Dalam Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia 1948-1949. Ada beberapa konsep yang menjadi penunjang atau pendukung dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu:

1. Teori Survival dalam Konteks Ketahanan Pemerintahan Darurat

Dalam studi ilmu politik dan sejarah, teori *survival* atau kelangsungan hidup suatu rezim atau negara menjadi penting dalam memahami bagaimana entitas politik mampu bertahan dalam kondisi ekstrem. *Survival* tidak hanya bermakna biologis atau fisik, tetapi juga melibatkan kemampuan sistem politik atau pemerintahan dalam menjaga keberlanjutan eksistensinya di tengah ancaman yang mengancam legitimasi,

kedaulatan, bahkan keberadaan negara itu sendiri.

Teori ini umumnya dikaji dalam pendekatan ketahanan negara (*state resilience*), yang menyatakan bahwa suatu pemerintahan dapat bertahan apabila memiliki kombinasi kekuatan internal seperti solidaritas elit, legitimasi ideologis, dan dukungan sosial; serta kemampuan adaptasi terhadap tekanan eksternal seperti agresi militer atau pendudukan wilayah. Menurut Jack Snyder, *regime survival* erat kaitannya dengan bagaimana aktor negara mampu melakukan strategi adaptif, menjaga loyalitas, serta mempertahankan fungsi-fungsi vital negara seperti komunikasi, logistik, dan legitimasi simbolik.¹⁰

Dalam konteks pemerintahan darurat seperti PDRI, teori *survival* dapat menjelaskan strategi taktis dan simbolik yang dilakukan untuk memastikan kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia pasca Agresi Militer Belanda II. Strategi ini termasuk pemindahan kekuasaan secara cepat, mobilisasi kekuatan lokal, penggunaan jaringan komunikasi darurat, serta diplomasi internasional. Semua ini merupakan bentuk *survival strategy* untuk memastikan negara tidak runtuh, meskipun ibukota telah jatuh dan pemimpin tertinggi ditawan.¹¹

Dengan demikian, teori *survival* memberikan kerangka berpikir yang penting dalam menganalisis dinamika PDRI sebagai bentuk adaptasi negara dalam kondisi krisis. Ia membantu menjelaskan bahwa keberhasilan PDRI bukan

¹⁰ Jack Snyder, *Explaining Political Survival: Leadership, Institutions, and the Role of Threat* (Ithaca: Cornell University Press, 2003), 85

¹¹ Valerie Bunce, *Comparative Democratization: Big Bangs, Gradualism, and The Survival of Regimes* (Cambridge: Cambridge University Press, 2000), 112.

hanya soal keberadaan fisik para pemimpin, tetapi juga keberhasilan menjaga fungsi simbolik dan operasional negara di tengah keterbatasan dan tekanan militer.

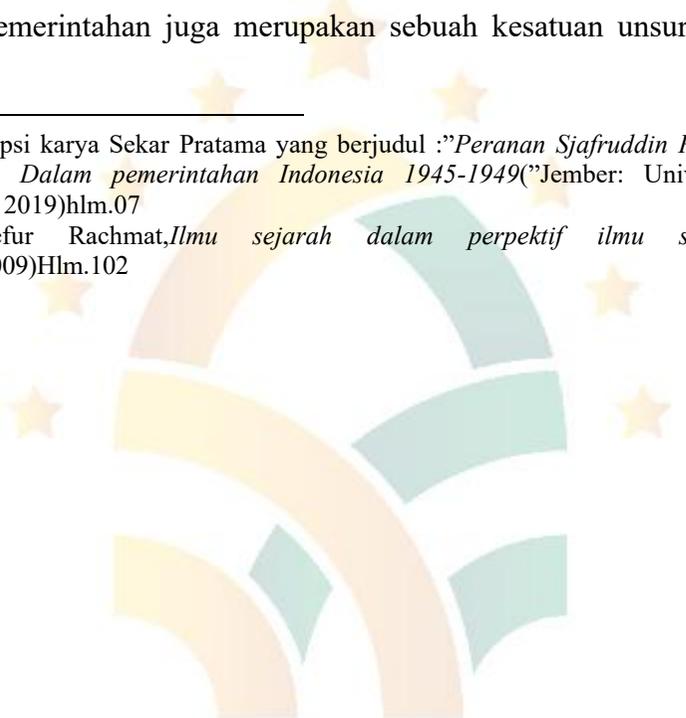
2. Sistem Pemerintahan

Pemerintahan merupakan sebuah proses berlangsungnya kegiatan yang mengatur kewenangan negara.

Pemerintahan juga merupakan sebuah kesatuan unsur yang

⁸ . Skripsi karya Sekar Pratama yang berjudul :”*Peranan Sjafruddin Perwira Negara Dalam pemerintahan Indonesia 1945-1949*”(Jember: Universitas Jember 2019)hlm.07

⁹ Saefur Rachmat,*Ilmu sejarah dalam perpektif ilmu sosial*,(Yogyakarta:Graha Ilmu,2009)Hlm.102



UINSSC

saling berkaitan satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk mencapai hal yang diinginkan. Pemerintahan adalah sebuah lembaga yang melakukan kegiatan pemerintahan yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk mengatur, mengelola, menentukan dan membuat kebijakan. Menurut Kusnardi mengatakan Pemerintahan sebagai urusan-urusan yang dilaksanakan oleh sebuah negara dalam mengadakan kesejahteraan bagi rakyatnya dengan menjalankan fungsinya dalam mengambil kewenangan dalam semua aspek¹⁰. Sebuah negara tidak akan terlepas dari sistem pemerintahan yang dianutnya, ada banyak jenis sistem pemerintahan yang dianut di seluruh dunia yaitu :

- a. Sistem pemerintahan Monarki Absolut : dimana sistem monarki absolut sudah digunakan sejak zaman dahulu, sistem monarki absolut bersifat kekuasaan tertinggi di pegang oleh satu individu, seperti raja atau ratu. Kekuasaan pada sistem monarki absolut akan dilanjutkan oleh keluarga yang memiliki garis darah seorang raja. Contoh negara yang menggunakan sistem ini antara lain Kerajaan Arab Saudi, Qatar dan Brunei Darussalam
- b. Sistem Pemerintahan Monarki Kontitusional merupakan sistem pemerintahan yang membatasi kekuasaan kepala pemerintahannya dan memisahkan kekuasaan yang dipegang oleh kepala negara dan kepala pemerintahan. Raja atau Ratusnya berfungsi sebagai kepala negara yang dipilih

¹⁰ Mualiadi Anangkota, Klasifikasi Sistem Pemerintahan, *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol 03, No 02, Tahun 2017 .hlm 150

secara turun temurun, sedangkan kepala pemerintahan biasanya disebut sebagai perdana menteri yang dipilih melalui hasil pemilihan di parlemen. Perdana Menteri memiliki batas waktu dalam memegang kekuasaan yang akan diganti sesuai waktu yang disepakati oleh parlemen. contoh negara yang menerapkan sistem tersebut antara lain Inggris, Belgia, Kamboja, Belanda dan Spanyol.

- c. Sistem Pemerintahan Republik merupakan sistem pemerintah yang menganggap bahwa kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat¹¹, sedangkan kepala negara dan pemerintahan diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk menjalankan fungsi pemerintah dan negara melalui pemilihan umum yang dilakukan sesuai dengan peraturan di tiap negara tertentu. Sistem republik dibagi menjadi dua yaitu sistem republik presidensial dan parlementer. Sistem republik presidensial merupakan sistem yang kepala pemerintahan dan kepala negara adalah satu orang yang diberi nama Presiden. Sedangkan sistem republik parlementer merupakan sistem yang kepala pemerintahannya dijabat oleh seorang Perdana Menteri yang berfungsi menjalankan kekuasaan eksekutif, Perdana Menteri dipilih oleh parlemen dan harus bertanggung jawab pada parlemen. Contoh negara yang menerapkan sistem republik Indonesia, Amerika, Korea, dan India.

3. Pemerintahan Darurat

¹¹Dr. Sirajuddin, *Dasar-dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2015), hlm 64

Pemerintahan darurat adalah sebuah konsep yang muncul ketika sebuah negara menghadapi situasi darurat dan mengancam stabilitas dan kedaulatannya yang mengakibatkan pemerintahan tidak dapat berjalan sebagaimana kondisi normal, menuntut negara bertindak dengan cara tidak lazim menurut aturan hukum.¹² Pemerintahan darurat merupakan upaya yang dilakukan untuk mempertahankan eksistensi dan kedaulatan sebuah negara dari ancaman luar maupun dalam yang dapat membahayakan negara ada tiga katagori keadaan darurat yaitu darurat militer, darurat sipil dan darurat perang¹³. Keadaan darurat dapat terjadi karena berbagai faktor seperti ekspansi negara lain, bencana alam, kecelakaan besar, serangan teroris, atau wabah penyakit yang mengancam kesehatan masyarakat. Dalam keadaan darurat, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengambil langkah-langkah ekstra, termasuk penggunaan sumber daya dan dana yang tidak biasa, untuk melindungi masyarakat dan memulihkan situasi. Keadaan darurat juga dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, seperti infrastruktur, ekonomi, dan keamanan sebuah negara.

Kewenangan negara yang sedang mengalami keadaan darurat memiliki hak istimewa yang digunakan sebagai upaya luar biasa, agar dapat menghapuskan kondisi darurat atau keadaan yang mengancam kehidupan bernegara, dalam

¹²Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.5

¹³Indonesia, Undang – undang no. 23 tahun 1959 tentang keadaan bahaya .

mengumumkan keadaan darurat hanya Presiden yang berhak mengeluarkan pernyataan negara dalam keadaan bahaya atau darurat.¹⁴

Adapun beberapa katagori darurat pada sebuah negara sebagai berikut :

1. Darurat Sipil merupakan keadaan darurat yang mengancam keamanan atau ketertiban hukum diseluruh wilayah suatu negara, yang diakibatkan oleh pemberontakan, kerusuhan, atau bencana alam, sehingga diperlukan penanganan khusus agar dapat diatasi dengan cepat.
2. Darurat Militer merupakan keadaan darurat suatu wilayah yang dikendalikan oleh militer sebagai pemimpin tertinggi. Dalam situasi ini, pemerintahan sipil biasanya tergantikan oleh otoritas militer. Darurat militer dapat diberlakukan dalam berbagai situasi, seperti perang, krisis ekonomi, mogok massal, pandemi penyakit, bencana dunia, atau kekacauan sipil dalam wilayah kekuasaan atau setelah terjadinya kudeta.
3. Darurat Perang merupakan kondisi di mana suatu negara menghadapi ancaman serius terhadap keamanan dan integritasnya, darurat perang dilakukan oleh suatu negara yang mendapatkan ancaman dari negara lain seperti ekspansi militer.

Menurut Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pemerintahan darurat harus memiliki beberapa unsur yang harus terpenuhi : Pemerintahan Darurat hanya berlaku sementara dan

¹⁴Indonesia, Undang-undang dasar, pasal 12, Tahun 1945.

tidak berlaku dalam keadaan permanen, bertujuan untuk mengatasi keadaan darurat yang mengancam kedaulatan negara., setelah keadaan darurat selesai, sistem pemerintahan harus dikembalikan seperti sebelumnya.¹⁵

Membentuk dan menerapkan pemerintahan darurat atau hukum darurat, ada beberapa ketentuan yang harus dipahami terlebih dahulu, supaya tidak terjadinya polemik atau pemanfaatan yang terjadi di kemudian hari setelah keadaan darurat diberlakukan. Ada beberapa negara yang pernah melakukan pemerintahan darurat seperti : Indonesia pada tahun 1948 , Sudan 25 Oktober 2021, Libya 1 September 1969, Myanmar 1962, 2011 dan pada tahun 2022.

H. METODE PENELITIAN

Melakukan penelitian sejarah tentulah diperlukan adanya sebuah metode penelitian agar sebuah penelitian dapat terlihat jelas serta dapat mudah dipahami maupun dipertanggung jawabkan, maka tentu saja penulis juga melakukan hal yang sama dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka sebagai bahan utamanya. Studi pustaka merupakan bahan bacaan dan rujukan yang digunakan penulis dalam mengumpulkan informasi terkait terkait penelitian, adapun beberapa jenis sumber literatur adalah buku, jurnal, artikel dan makalah.¹⁶

¹⁵Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta :Raja Grafindo Persada, 2007) hlm.6-7

¹⁶Afrizal.*Metode Penelitian Kualitatif*,(Depok : Rajawali Pers,Juli 2019)hlm 122

Sejarah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sejarah sebagai ilmu yang memiliki metodologi yang dapat dipertanggung jawabkan¹⁷, metodologi dapat diartikan sebagai seperangkat prinsip dan aturan yang bersifat sistematis dan terstruktur, dalam melakukan penelitian sejarah, prinsip dan aturan tersebut akan menjadi landasan bagi penulis dalam mengumpulkan informasi-informasi sejarah secara kritis dan menyajikan secara sintesis dari sumber-sumber yang sudah dipelajari penulis. Penguatan metode penelitian akan menghasilkan penelitian yang sesuai dari harapan penulis, maka diperlukan metode yang relevan untuk penelitian sejarah.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah, dalam metode penelitian sejarah harus terdiri dari empat tahapan yaitu heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi. Adapun penjelasan dari keempat tahapan tersebut sebagai berikut

1. Heuristik

Heuristik adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan, kata heuristik berasal dari bahasa Yunani dengan akar kata "heuriskein" yang memiliki arti untuk menemukan, heuristik berkaitan dengan pemecahan masalah pada penemuan tersebut.

Heuristik merupakan tahapan awal dalam metode penelitian sejarah, tahapan ini lebih mengerucut pada pengumpulan data-data pengumpulan sumber-sumber yang

¹⁷ Kontowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, Juli 2013). hlm 471

berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Pada tahapan pengumpulan data ada banyak cara seperti lewat buku, jurnal artikel, berita acara, karya tulis ilmiah atau juga bisa dengan terjun langsung kelapangan. Tahapan pengumpulan data pada penelitian ini penulis mencari data yang berhubungan dengan Pemerintahan Darurat republik Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

2. Verifikasi

Tahapan kedua dalam metodologi penelitaian sejarah adalah verifikasi atau kritik yang bertujuan untuk mencari bukti-bukti atau bahan - bahan sumber baik sumber primer atau sumber sekunder.¹⁹ Verifikasi juga memiliki arti mengecek ulang atau mengaudit sumber sumber yang sudah di dapatkan pada tahapan pertama, apakah sumber sumber tersebut dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejarah. Sumber primer merupakan sumber yang dekat dengan penelitian yang sedang dikaji sedangkan sumber sekunder adalah sebuah sumber yang menjadi pendukung dari sebuah penelitian.

Verifikasi atau kritik sumber sejarah meliputi kritik ekstren dan kritik intren, kritik ekstren di dalam penelitian sejarah umumnya menyangkut keaslian dan kradibilitas sumber sejarah, sedangkan kritik intren adalah sebuah penilaian yang berupa membandingkan sumber satu dengan sumber yang

¹⁸Kontowijoyo.*Pengantar Ilmu Sejarah*.(Yogyakarta:Penerbit Tiara Wacana, Juli 2013).hlm 69

¹⁹Wasino Hartatik,Indah Sri.*Metode Penelitain Sejarah :Dari Riset hingga Penulisan*. (Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, Tahun 2018)hlm.12

lainnya. Tahapan kritik tersebut penulis lakukan sebagai upaya untuk menguji sumber sumber yang telah di dapatkan. Sehingga dengan melakukan tahapan kritik tersebut di dapatkan banyak sumber-sumber baik primer maupun skunder yang kredibel dan dapat di pertanggung jawabkan.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan ke tiga dari metode penelitian sejarah, interpretasi adalah upaya untuk melakukan penafsiran atas sumber yang sudah di dapat. Tujuan dari interpretasi ialah untuk menghimpun sumber-sumber agar berkesinambungan atas objek yang di teliti. Pada tahapan ini penulis akan memberikan pandangan teoritis terhadap peristiwa-peristiwa sejarah yang sudah di kaji sebelumnya, dari pandangan pandangan tersebut akan memunculkan penafsiran terhadap peristiwa sejarah yang sudah terverifikasi, fakta fakta sejarah kemudian akan di susun menjadi peristiwa sejarah yang di yaqinin kebenarannya.

Kegiatan interpretasi memerlukan dua tahapan yaitu tahapan analisis dan sintesis, analisis dilakukan jika sebuah sumber sejarah yang di temukan mengandung beberapa kemungkinan, maka data tersebut perlu untuk di komparasikan dalam bentuk determinisme rasial seperti mengkomparasikanya dengan keadaan geografis, ekonomi, psikologi, sosiologi, dan spiritual. Sedangkan sisntesis merupakan gabungan dari beberapa fakta dalam rangkaian sejarah berdasarkan urutan waktu.

Interpretasi menuntut penulis untuk mengeksemisasi sebuah fakta sejarah dan sumber-sumber sejarah lalu

mengkorelasikanya dengan teori-teori yang di gunakan dalam penelitian dan menyesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian di rangkum agar dapat memberikan sudut pandang yang luas terhadap penafsiran sejarah, dalam menginterpretasikan sebuah peristiwa sejarah memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap objek penelitian agar dapat melihat dan menilai sebuah peristiwa sejarah dari sudut pandang yang luas, maka perlu menguasai pengetahuan sejarah yang mendalam agar dalam menginterpretasikan sebuah peristiwa sejarah yang objektif dan komperhensif.

4. Historiografi

Tahapan akhir dalam metodologi penelitian sejarah adalah Historiografi atau penulisan sejarah. pada tahapan ini penulis menyusun semua tahapan metodologi penelitian sejarah dari mulai heuristik, verifikasi dan interpretasi. Historiografi merupakan penjabaran dari semua metode yang ada lalu mengimplementasikannya dalam bentuk sebuah tulisan sejarah yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, dalam sebuah penulisan sejarah harus menyesuaikan dengan fakta fakta sejarah dari berbagai sumber yang telah di seleksi dan di interpretasikan.

Dalam penulisan sejarah, seorang sejarawan harus sadar bahwa tulisan tersebut bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk dibaca oleh orang lain²⁰. Maka dalam penulisan historiografi harus secara kronologis dan sistematis sehingga

²⁰Anwar Sanusi *pengantar ilmu Sejarah* ,(Cirebon Syekh Nurjati press,2013)hlm138

menghasilkan sebuah diskripsi yang naratif dengan memperhatikan kronologis. Penulisan sejarah juga harus ditulis dengan bahasa yang sederhana, lugas dan ilmiah agar dapat dipahami dengan mudah oleh para pembacanya.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada sistematika penulisan ini akan disusun atas pembagian Bab, sub bab yang akan menguraikan pembahasan dari penyusunan penulisan skripsi yaitu sebagai berikut.

BABI : Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang akan membahas tentang Pendahuluan, yang berisi tentang menguraikan persoalan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang kondisi Indonesia pasca kemerdekaan 1945.

BAB III: Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang pembentukan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia.

BAB IV: Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang terbentuknya Pemerintahan Darurat Republik Indonesia dalam mempertahankan eksistensi kemerdekaan Republik Indonesia.

BAB V: Penutup yaitu sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penulis juga memberikan saran sebagai bahan acuan untuk memperbaiki penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis.

BAB II

KONDISI PEMERINTAHAN INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

A. Kelahiran Indonesia Dan Reaksi Rakyat Indonesia

Republik Indonesia lahir dari rangkaian panjang perjuangan bangsa yang mencapai puncaknya pada akhir Perang Dunia II. Janji kemerdekaan yang diumumkan oleh Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, pada September 1944 merupakan strategi politik kolonial untuk mempertahankan dukungan bangsa Indonesia terhadap Jepang yang mulai terdesak di medan perang. Janji ini, walaupun bersifat manipulatif, menjadi peluang strategis yang dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh pergerakan nasional. Sebagai implementasi janji tersebut, dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 29 April 1945 yang bertugas menyusun dasar negara dan Undang-Undang Dasar. Sidang BPUPKI menghasilkan perumusan awal Pancasila oleh Soekarno pada 1 Juni 1945 dan rancangan UUD pada 10–17 Juli 1945²¹.

Setelah BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945, dinamika perjuangan mengalami eskalasi tajam. Jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada 6 dan 9 Agustus 1945 mempercepat proses kekalahan Jepang. Informasi kekalahan tersebut akhirnya diketahui oleh para pemuda Indonesia melalui siaran radio luar negeri, meskipun pihak Jepang berusaha

²¹ Batarang R. Hutangalung, *Serangan Umum 1 Maret 1949* (Yogyakarta; LKiS Yogyakarta, 2012) hlm. 83

menutupinya. Ketidak sepahaman antara golongan muda dan tua mencerminkan perbedaan strategi politik antara kelompok yang lebih progresif dan revolusioner dengan kelompok yang cenderung berhati-hati.

Peristiwa Rengasdengklok pada 15 Agustus 1945 menjadi titik kritis dalam sejarah perjuangan. Diculiknya Soekarno dan Hatta oleh para pemuda adalah bentuk tekanan politik untuk segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan dari Jepang melalui PPKI. Disinilah terlihat teori kedaulatan rakyat secara langsung diwujudkan: rakyat (diwakili pemuda) mendesak pemimpinnya untuk bertindak atas nama bangsa, bukan atas restu penjajah.

Peristiwa penyusunan teks Proklamasi di rumah Laksamana Muda Maeda pada malam 16 Agustus juga mencerminkan pentingnya diplomasi informal dan dukungan moral dari individu Jepang yang bersimpati. Penyusunan naskah tersebut secara simbolik mencerminkan transisi dari perjuangan diplomatik menuju deklarasi resmi kedaulatan.

Puncaknya, pada 17 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia atas nama seluruh rakyat. Tindakan ini merupakan manifestasi nyata dari teori legitimasi kekuasaan rakyat seperti yang dikemukakan oleh Max Weber: bahwa kekuasaan menjadi sah bukan karena warisan atau kekuatan senjata, tetapi karena pengakuan dari rakyat²². Proklamasi yang dibacakan di Pegangsaan Timur 56 menjadi

²² Nugroho Notokusanto, *Tentara PETA Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1979), hlm. 102.